

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI PASANGKAYU MELAWAN KOTAK KOSONG DI KECAMATAN BAMBAIRA KABUPATEN PASANGKAYU

Irfan ^{1,*}; Muhammad Arief ²; Syamsul Bahri ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; irfanippang813@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; muhammadarief@untad.ac.id

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sy2msul@gmail.com

*Correspondence : irfanippang813@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Bambaira; Kotak Kosong; Partisipasi Masyarakat; Pemilihan Bupati; Pasangkayu*

Received : Juni 2026

Revised : Juli 2026

Accepted : Juli 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut (Dwiningrum, 2011), yang meliputi partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dilaksanakan di Kecamatan Bambaira melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Ketua KPPS, anggota KPPS, dan masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat telah terlihat pada keempat bentuk partisipasi. Partisipasi uang tidak mengalami kendala, sedangkan partisipasi tenaga dan partisipasi buah pikiran belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif serta terbatasnya penyebaran informasi politik. Pada partisipasi pengambilan keputusan, masyarakat menunjukkan perbedaan sikap antara menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab demokratis dan tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap calon tunggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap proses politik, pemahaman politik, dan persepsi terhadap kualitas demokrasi lokal, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan dengan calon tunggal.

ABSTRACT:

This study aims to describe the forms of community participation in the Pasangkayu Regent Election against an empty box in Bambaira District, Pasangkayu Regency using the theory of community participation according to (Dwiningrum, 2011), which includes monetary participation, labor participation, intellectual participation, and decision-making participation. This study uses a qualitative approach with a descriptive type, conducted in Bambaira District through interviews, observations, and documentation with the Head of the KPPS, KPPS memberes, and the community as informants. The results of the

study indicate that community participation has been seen in all four forms of participation. Financial participation did not experience obstacles, while labor participation and intellectual participation were not optimal due to the still inactive community and limited dissemination of political information. In decision-making participation, the community showed a difference in attitude between using the right to vote as a form of democratic responsibility and not using the right to vote as a form of dissatisfaction with a single candidate. This study shows that community participation is influenced by the level of trust in the political process, political understanding, and perceptions of the quality of local democracy, so that the results of the study are expected to be input for election organizers in increasing community participation in elections with a single candidate.

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat diwujudkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah menjadi indikator keberhasilan demokrasi karena menunjukkan kuatnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk (Kumendong, Kaawoan dan Rengkung, 2019).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan implementasi demokrasi lokal yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan pemilihan, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan (Azhar, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan bentuk partisipasi politik yang mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut (Saepudin, Damayani dan Budiono, 2018), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi terhadap kebijakan. Dalam Pilkada, partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi politik, pencarian informasi mengenai pasangan calon, penggunaan hak pilih, pengawasan jalannya pemilihan, hingga pemberian penilaian terhadap hasil Pilkada. Selain itu, partisipasi politik juga menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat karena menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara mandiri (Prastyanti, 2018), demokrasi lokal di Indonesia dihadapkan pada fenomena

pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Fenomena ini memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C yang mengatur bahwa Pilkada tetap dapat dilaksanakan apabila setelah perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat diberikan dua pilihan, yaitu memilih pasangan calon tunggal atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon yang tersedia.

Fenomena calon tunggal terus meningkat dalam beberapa periode Pilkada dan menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak selalu berlangsung secara ideal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dominasi kekuatan politik tertentu, minimnya kaderisasi partai politik, terbatasnya figur alternatif yang memenuhi syarat pencalonan, maupun terbentuknya koalisi besar partai politik sehingga tidak muncul pasangan calon lain. Akibatnya, ruang kompetisi politik menjadi terbatas dan suara kotak kosong muncul sebagai salah satu bentuk ekspresi politik masyarakat (Ekowati, 2019).

Fenomena tersebut terjadi pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pasangkayu yang hanya diikuti satu pasangan calon. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bambaira sebanyak 7.185 pemilih. Dari jumlah tersebut, hanya 5.040 pemilih menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 2.754 pemilih memilih pasangan calon tunggal, sedangkan 2.154 pemilih memilih kotak kosong. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (*golongan putih*/Golput). Data tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh pemilih yang hadir memilih kotak kosong sebagai bentuk pilihan politiknya.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingginya suara kotak kosong tidak semata-mata disebabkan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sebagian masyarakat menilai keberadaan calon tunggal membatasi alternatif pilihan sehingga mereka tidak dapat membandingkan visi, misi, maupun program antarcalon. Sebagian lainnya memilih kotak kosong sebagai bentuk penyampaian aspirasi politik karena menganggap calon yang tersedia belum mampu mewakili kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak pilih karena rendahnya minat terhadap politik, kurangnya informasi mengenai Pilkada, serta anggapan bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sejak awal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi fokus penelitian bukan sekadar tingkat kehadiran pemilih, tetapi bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilkada calon tunggal yang mempertemukan pasangan calon dengan kotak kosong. Fenomena ini menarik dikaji karena masyarakat tetap berpartisipasi dalam proses demokrasi, namun sebagian memilih kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik terhadap pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana masyarakat memaknai calon tunggal, faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik mereka, serta bentuk partisipasi yang muncul selama proses Pilkada berlangsung.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal lebih banyak

dikaji dari aspek hukum, demokrasi elektoral, dan perilaku memilih. Penelitian (Khaerah, Junaedi dan Muslimin, 2019) menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat meliputi *electoral activity*, *lobbying*, *organizational activity*, *contacting*, dan *violence*, yang dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kebebasan memilih. Sementara itu, (Ronaldi, 2023) menemukan bahwa pilihan terhadap kotak kosong dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pilihan rasional, terutama berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan petahana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan partai politik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, partisipasi masyarakat, serta kompetisi demokrasi pada Pilkada berikutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif kondisi nyata mengenai partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan dengan calon tunggal, tanpa menggunakan analisis statistik.

Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Informan terdiri atas satu orang Ketua KPPS berinisial R, tiga orang anggota KPPS yang masing-masing berinisial A, P, dan N, satu orang masyarakat yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya berinisial S, serta satu orang masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya berinisial A.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu.

Hasil

1. Partisipasi Uang

Aspek pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaira telah mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilihan. Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu memenuhi kebutuhan operasional penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, distribusi logistik pemilu, seperti kotak suara, surat suara, tinta, dan perlengkapan pendukung lainnya, terlaksana sesuai prosedur sehingga tidak ditemukan hambatan yang mengganggu proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang memadai berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilihan. Ketersediaan anggaran yang tepat waktu memungkinkan penyelenggara melaksanakan setiap tahapan sesuai jadwal, sedangkan kelengkapan logistik memberikan jaminan bahwa proses pemungutan suara dapat berlangsung secara tertib dan lancar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KPPS, Ibu Rustina, yang menjelaskan bahwa tidak terdapat kendala berarti terkait anggaran maupun logistik karena seluruh kebutuhan telah disediakan melalui KPU sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dukungan anggaran dan logistik, penelitian juga menemukan bahwa penyelenggara memperoleh dukungan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Fasilitas berupa ruang sekretariat, komputer, printer, serta perlengkapan administrasi lainnya membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi selama tahapan pemilihan berlangsung. Ketersediaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta mendukung efektivitas koordinasi selama proses pemilihan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPPS, dukungan yang diberikan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas penyelenggara.

Penelitian menunjukkan bahwa biaya pribadi untuk datang ke TPS tidak menjadi faktor yang memengaruhi keputusan menggunakan hak pilih. Sebagian besar informan menyatakan bahwa biaya transportasi maupun akomodasi menuju TPS masih dalam batas kemampuan sehingga tidak menghambat mereka untuk hadir pada hari pemungutan suara. Bahkan informan yang memilih tidak menggunakan hak pilih (Golput) juga menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor biaya, melainkan oleh pertimbangan lain di luar aspek ekonomi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek finansial bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bambaira. Dukungan anggaran pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu telah berjalan dengan baik, sementara biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk hadir ke TPS relatif kecil dan mudah dijangkau.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam aspek keuangan masih terbatas pada pembiayaan pribadi untuk menggunakan hak pilih. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi finansial terhadap aktivitas politik, seperti mendukung kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, atau aktivitas kampanye yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih relatif rendah. Dengan demikian, partisipasi uang dalam penelitian ini lebih tercermin pada kemampuan pemerintah menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pemilu dan kemampuan masyarakat memenuhi biaya pribadi untuk datang ke TPS, bukan pada keterlibatan masyarakat dalam pendanaan kegiatan politik.

2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaira tergolong cukup tinggi, terutama pada keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai pemilih. Bentuk partisipasi ini tercermin dari tingginya minat masyarakat untuk terlibat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Banyaknya masyarakat yang mendaftar menunjukkan adanya kesediaan untuk memberikan tenaga dan waktu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Meskipun demikian, proses rekrutmen tetap dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan usia produktif serta tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) guna memperoleh sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara, tetapi juga melalui kontribusi tenaga dalam mendukung seluruh tahapan pemilihan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KPPS, Ibu Rustina, yang menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota KPPS cukup tinggi, namun proses seleksi tetap dilakukan secara ketat agar penyelenggara yang terpilih memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Selain keterlibatan sebagai penyelenggara, partisipasi tenaga juga terlihat melalui pelaksanaan tugas operasional oleh anggota KPPS selama tahapan pemilihan berlangsung. Penyelenggara menjalankan berbagai tugas, mulai dari persiapan administrasi, koordinasi antarpetugas, pelayanan kepada pemilih, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Keterlibatan aktif penyelenggara tersebut berkontribusi terhadap terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penelitian menemukan bahwa bentuk partisipasi tenaga masyarakat sebagai pemilih masih menunjukkan variasi. Sebagian masyarakat meluangkan waktu untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wujud pelaksanaan hak dan tanggung jawab politiknya. Sebaliknya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (Golput), sehingga tidak memberikan kontribusi tenaga dalam bentuk kehadiran pada hari pemungutan suara.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi masing-masing individu terhadap pelaksanaan pemilihan. Informan yang menggunakan hak pilih memandang kehadiran di TPS sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menentukan arah pembangunan daerah, sedangkan informan yang memilih Golput beranggapan bahwa pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong tidak memberikan dorongan yang cukup untuk berpartisipasi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dalam penelitian ini diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu dan kehadiran masyarakat sebagai pemilih di TPS. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota KPPS menunjukkan adanya kesediaan memberikan tenaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Namun, pada sisi partisipasi sebagai pemilih, masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak hadir di TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tenaga masyarakat dalam Pilkada di Kecamatan Bambaira dipengaruhi oleh perbedaan motivasi, persepsi, dan pilihan politik masing-masing individu.

3. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran masyarakat di Kecamatan Bambaira dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasangkayu masih belum optimal. Bentuk partisipasi ini tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta mengikuti diskusi mengenai pelaksanaan pemilihan. Meskipun penyelenggara telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme pemungutan suara, termasuk tata cara pemilihan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong, penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemilihan masih bervariasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara lebih banyak berfokus pada penyampaian informasi mengenai prosedur teknis pelaksanaan pemungutan suara. Namun, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, maupun bertukar gagasan mengenai pelaksanaan pemilihan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran belum berkembang secara optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KPPS, Ibu Rustina, yang menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme pemilihan tetap dilaksanakan, tetapi kontribusi masyarakat dalam bentuk penyampaian ide maupun pendapat masih rendah karena terbatasnya ruang diskusi publik.

Penelitian juga menemukan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan buah pikiran. Sebagian masyarakat tidak terlibat dalam diskusi mengenai pelaksanaan pemilihan karena minimnya forum komunikasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebaliknya, sebagian masyarakat memanfaatkan diskusi informal bersama keluarga, tetangga, atau kerabat sebagai sarana untuk memperoleh informasi sekaligus bertukar pandangan mengenai mekanisme pemilihan dan pilihan yang tersedia.

Perbedaan tingkat partisipasi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan keberadaan ruang diskusi memiliki pengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam memberikan buah pikiran. Masyarakat yang memperoleh kesempatan berdiskusi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemilihan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki ruang diskusi cenderung hanya menerima informasi secara terbatas tanpa terlibat dalam proses pertukaran pendapat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi buah pikiran masyarakat di Kecamatan Bambaira masih tergolong belum merata. Meskipun penyelenggara telah melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan ide, pendapat, maupun masukan terhadap pelaksanaan Pilkada masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan ruang komunikasi dan forum diskusi yang lebih terbuka agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang aktif memberikan gagasan dalam proses demokrasi.

4. Partisipasi Uang

Partisipasi masyarakat Kecamatan Bambaira dalam bentuk penyampaian ide, pendapat, dan keterlibatan dalam diskusi mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasangkayu masih belum merata. Penyelenggara telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme pemungutan suara, khususnya pada pemilihan dengan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Meskipun demikian, penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemilihan masih beragam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara lebih berorientasi pada penyampaian informasi mengenai tata cara pemungutan suara. Namun, kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun berdiskusi mengenai pelaksanaan pemilihan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran belum berkembang secara optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua KPSS, Ibu Rustina, yang menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme pemilihan tetap dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat masih rendah karena terbatasnya ruang diskusi publik.

Penelitian juga menemukan adanya perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat dalam memberikan buah pikiran. Sebagian masyarakat belum aktif mengikuti diskusi mengenai pelaksanaan pemilihan karena tidak tersedianya forum komunikasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebaliknya, sebagian masyarakat memanfaatkan diskusi informal bersama keluarga, tetangga, maupun kerabat sebagai media untuk bertukar informasi dan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pemilihan serta pilihan yang tersedia.

Perbedaan tingkat partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ruang komunikasi dan akses terhadap informasi berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menyampaikan ide dan pendapat. Masyarakat yang memiliki kesempatan berdiskusi cenderung lebih memahami mekanisme pemilihan, sedangkan masyarakat yang tidak memperoleh ruang diskusi cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbatas dan kurang terlibat dalam proses pertukaran gagasan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi buah pikiran masyarakat di Kecamatan Bambaira masih perlu ditingkatkan. Meskipun penyelenggara telah melaksanakan sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan ide, pendapat, maupun masukan terhadap pelaksanaan Pilkada masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi yang disertai dengan penyediaan ruang diskusi yang lebih terbuka agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Pembahasan

1. Implikasi Aspek Finansial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Aspek finansial bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaira. Dari sisi penyelenggara, pengelolaan anggaran dan distribusi logistik telah berjalan dengan baik sehingga seluruh tahapan pemilihan dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti. Sementara itu, dari sisi masyarakat, biaya transportasi menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih tergolong terjangkau sehingga tidak menjadi hambatan dalam menggunakan hak pilih. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi finansial terhadap kegiatan politik, seperti kampanye atau sosialisasi, masih relatif rendah sehingga partisipasi lebih banyak diwujudkan melalui kehadiran di TPS daripada keterlibatan aktif dalam proses politik.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian (Filda, Pageno dan Rusdin, 2024) yang menemukan bahwa partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan, Kepala Desa Di Desa Bambapula Kecamatan, Dampal Utara Kabupaten, Toli-Toli Tahun, 2019, bahwa dalam pemberian, suara sudah maksimal, namun, dalam menghadiri rapat umum dan, memben, tuk dan, bergabung, dalam kelompok kepen, tin, gan, belum maksimal karena ada beberapa faktor pen, didikan,, tin, gkat pekerjaan,, tin, gkat kekeluargaan, dan, tin, gkat kedudukan,.

Selain itu, penelitian (Nadya, Hasbullah dan Sasterio, 2023) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Tawaeli dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat tinggi, meski diselenggarakan pada masa pandemic Covid 19. Faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat yaitu kinerja dari penyelenggara pemilu dan lokalisme/kesamaan tempat tinggal pemilih dengan kandidat.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian (Lahtifah, Alamsyah dan

Rusdin, 2025) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat bervariasi berdasarkan empat kategori partisipasi politik, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang tergolong sebagai aktivis dan partisipan, sementara mayoritas berada pada kategori pengamat dan apolitis. Penurunan partisipasi politik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa aspek finansial dalam penelitian ini lebih berfungsi sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemilihan daripada sebagai penentu partisipasi politik masyarakat. Ketersediaan anggaran, kelancaran distribusi logistik, dan biaya menuju TPS yang terjangkau telah menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan Pilkada. Namun, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik di luar penggunaan hak pilih menunjukkan bahwa partisipasi politik belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya *sense of ownership* masyarakat terhadap proses demokrasi sehingga diperlukan penguatan pendidikan politik, peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta pemberdayaan masyarakat agar partisipasi tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh proses demokrasi.

2. Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaira tergolong cukup baik, terutama pada proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pelaksanaan tahapan pemilihan. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota KPPS menunjukkan adanya kesadaran untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan demokrasi. Meskipun demikian, proses rekrutmen tetap menerapkan seleksi berdasarkan usia produktif dan tingkat pendidikan minimal SMA guna menjamin kualitas penyelenggara. Selain itu, dukungan masyarakat juga terlihat melalui penyediaan sarana operasional dan bantuan administratif yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Namun, pada tingkat masyarakat umum masih ditemukan perbedaan tingkat partisipasi, di mana sebagian masyarakat aktif hadir di TPS dan mengikuti diskusi politik, sedangkan sebagian lainnya memilih Golput karena menganggap kontestasi calon tunggal melawan kotak kosong kurang menarik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Kamindang, Ambotuo dan Hamid, 2023) yang menyatakan bahwa kegiatan debat politik tidak cukup efektif mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Preferensi (sikap) politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu tahun 2020, lebih cenderung dan sangat kuat dibentuk oleh faktor daya pikat (personal) figur kandidat. Meskipun itu, pemilih di wilayah kelurahan Mamboro Barat meyakini para kandidat akan mampu mewujudkan visi-misi dan program-program kebijakan yang di usungnya jika terpilih. Para pemilih masih percaya bahwa keempat pasangan calon tersebut sangat komitmen dengan janji-janji politik yang disampaikan

lewat berbagai media-media kampanye.

Selain itu, penelitian (Pasinringi dan Bahri, 2019) menjelaskan bahwa pada aspek kognitif masyarakat terhadap platform partai politik sangatlah bervariasi dan cenderung tidak maksimal, sedangkan aspek konatif diketahui bahwa masyarakat menentukan sikapnya pada sebuah pilihan politik sangat dipengaruhi faktor figur melalui kedekatan emosional, dimana platform Partai Politik tidak memberi efek yang besar terhadap sikap masyarakat dalam sebuah pilihan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Lamohamad, Pageno dan Sisrilnardi, 2024) yang menemukan bahwa isu dan kebijakan politik kandidat yang di tawarkan menjadi faktor dengan pengaruh lebih tinggi (51,5% hubungan dan 26,5% pengaruh) dibandingkan citra kandidat (47,2% hubungan dan 22,2% pengaruh) terhadap perilaku memilih Generasi Z. Preferensi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa partisipasi tenaga dalam penelitian ini tidak hanya mencerminkan keterlibatan fisik masyarakat, tetapi juga menggambarkan tingkat kesadaran politik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tingginya antusiasme masyarakat dalam rekrutmen KPPS menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Di sisi lain, masih ditemukannya masyarakat yang memilih Golput menunjukkan bahwa kualitas kompetisi politik turut memengaruhi tingkat partisipasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik dan kegiatan sosial menjadi indikator adanya *political engagement* yang dapat memperkuat partisipasi demokratis. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi tenaga tidak hanya memerlukan penyelenggaraan pemilu yang profesional, tetapi juga penguatan pendidikan politik, perluasan ruang dialog publik, dan peningkatan kualitas kompetisi politik agar masyarakat terdorong untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses demokrasi.

3. Dinamika Pemikiran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Tunggal

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide, pendapat, dan pemikiran mengenai Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaira masih belum merata. Meskipun penyelenggara telah melaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong, penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap mekanisme pemilihan dan kurang terlibat dalam diskusi publik mengenai proses demokrasi. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesempatan berdiskusi dengan keluarga maupun lingkungan sekitar menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan kotak kosong sebagai pilihan yang sah dalam sistem demokrasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ardiani, Kartini dan Herdiansah, 2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan sosialisasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam membangun pemahaman masyarakat melalui komunikasi yang efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh informasi politik secara memadai cenderung memiliki tingkat literasi politik (*political literacy*) yang lebih baik sehingga lebih mudah memahami mekanisme pemilu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan jangkauan sosialisasi masih memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemilihan calon tunggal.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Nadir dan Wardani, 2019) yang menemukan bahwa ruang diskusi di lingkungan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik. Melalui *public deliberation*, masyarakat dapat bertukar informasi, menyampaikan pendapat, serta membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu politik. Penelitian menunjukkan bahwa proses diskusi publik berkontribusi terhadap pembentukan opini politik, peningkatan literasi politik, dan penguatan partisipasi warga dalam demokrasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif berdiskusi dengan keluarga atau tetangga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemilihan dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki ruang komunikasi politik.

Selain itu, penelitian (Akbar dan Maisa, 2024) menjelaskan bahwa Pilkada dengan calon tunggal merupakan mekanisme yang sah secara konstitusional, tetapi tetap memunculkan perdebatan mengenai integritas pemilu dan kualitas demokrasi karena kompetisi elektoral menjadi sangat terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang tetap menerima mekanisme calon tunggal sebagai bagian dari demokrasi dan masyarakat yang menilai kondisi tersebut belum mencerminkan demokrasi yang ideal.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa partisipasi buah pikiran masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman politik, efektivitas sosialisasi, serta tersedianya ruang komunikasi di lingkungan sosial. Sosialisasi yang telah dilakukan penyelenggara mampu memberikan pemahaman dasar mengenai prosedur pemilihan, tetapi belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pertukaran gagasan. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap calon tunggal menunjukkan bahwa tingkat *political efficacy* setiap individu tidak sama. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dalam bentuk buah pikiran memerlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif, penguatan pendidikan politik, dan perluasan ruang dialog publik agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur pemilihan, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam membangun kualitas demokrasi di tingkat lokal.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Pilihan Politik

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Pemilihan Bupati Pasangkayu di Kecamatan Bambaيرا dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap proses demokrasi, persepsi mengenai keberadaan calon tunggal melawan kotak kosong, serta harapan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah. Sebagian masyarakat tetap menggunakan hak pilih karena memandang kehadiran di TPS

sebagai bentuk tanggung jawab warga negara sekaligus upaya menjaga legitimasi demokrasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilih (Golput) sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik yang dinilai kurang kompetitif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek prosedural pemilu, tetapi juga oleh penilaian terhadap kualitas demokrasi yang mereka rasakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adriansyah *dkk.*, 2023) yang menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap proses politik dan keyakinan bahwa suara yang diberikan mampu memengaruhi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan politik (*political trust*) yang tinggi cenderung lebih aktif menggunakan hak pilihnya, sedangkan rendahnya kepercayaan terhadap proses politik dapat mendorong munculnya sikap apatis maupun golongan putih. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini, di mana keputusan masyarakat untuk memilih ataupun tidak memilih sama-sama didasarkan pada penilaian mereka terhadap kualitas demokrasi lokal.

Temuan berikutnya didukung oleh penelitian (Engkus *dkk.*, 2019) yang menyatakan bahwa Fenomena calon tunggal menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih karena masyarakat memiliki pilihan politik yang terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya calon yang mampu menjadi pesaing, lemahnya pencalonan oleh partai politik, dan berimplikasi pada menurunnya kualitas kompetisi politik. Dengan demikian, kedua bentuk tersebut tetap mencerminkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses politik, meskipun diwujudkan melalui cara yang berbeda.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Rahman, Satriawan dan Diaz, 2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari tersedianya pilihan politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin secara bebas dan rasional. Penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik yang sehat melalui tersedianya alternatif calon merupakan unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini, karena sebagian informan menilai keberadaan calon tunggal menyebabkan pilihan politik menjadi terbatas sehingga memengaruhi keputusan mereka untuk tidak menggunakan hak pilih.

Berdasarkan temuan penelitian dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa pengambilan keputusan masyarakat dalam Pilkada calon tunggal merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan politik. Kepercayaan terhadap sistem demokrasi mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan daerah. Sebaliknya, persepsi bahwa proses politik belum menghadirkan kompetisi yang sehat melahirkan sikap Golput sebagai bentuk kritik terhadap kualitas demokrasi lokal. Kondisi ini

menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu secara teknis, tetapi juga memerlukan penguatan literasi politik, peningkatan kepercayaan publik, serta terciptanya iklim demokrasi yang lebih kompetitif sehingga masyarakat merasa bahwa setiap suara yang diberikan benar-benar memiliki arti dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Pasangkayu melawan kotak kosong di Kecamatan Bambaira menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi calon tunggal dalam Pilkada. Masyarakat tetap berpartisipasi melalui penggunaan hak pilih, mengikuti sosialisasi, serta mencari informasi mengenai pelaksanaan pemilihan, namun tingkat keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi politik yang optimal. Tingginya perolehan suara kotak kosong menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan hak politiknya sebagai bentuk ekspresi demokratis terhadap keterbatasan pilihan calon yang tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa fenomena calon tunggal tidak hanya memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga kualitas demokrasi lokal, karena ruang kompetisi politik yang terbatas berdampak pada kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai partisipasi masyarakat pada Pilkada calon tunggal, khususnya dalam perspektif demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kecamatan Bambaira sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik politik dan sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor lain yang memengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon tunggal maupun kotak kosong. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian, melibatkan lebih banyak informan, serta mengkaji faktor sosial, ekonomi, budaya, dan komunikasi politik yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada calon tunggal. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan partai politik dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih demokratis pada penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Arief dan Bapak Syamsul Bahri atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan

dukungan, bantuan, serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Adriansyah dkk. (2023) "DETERMINAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BUKITTINGGI TAHUN 2019," *Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU)*, hlm. 19–33.
- Akbar, M. dan Maisa, M. (2024) "Challenging Electoral Integrity: The Constitutionality of the 'Empty Box' Victory in the 2018 Makassar Mayoral Election," *Lex Scientia Law Review*, 8(2), hlm. 595–636. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.16559>.
- Ardiani, D., Kartini, D.S. dan Herdiansah, A.G. (2019) "STRATEGI SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN NGAWI UNTUK MEMBENTUK PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN NGAWI," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), hlm. 18. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>.
- Azhar, M. (2018) "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), hlm. 206–214. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.206-214>.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011) *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekowati, E.Y. (2019) "Pragmatisme Dan Politik Identitas Pada Pilkada Untuk Meraih Kekuasaan," *Jurnal Transformative*, 5(1), hlm. 16–37. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>.
- Engkus, E. dkk. (2019) "POLICY IMPLICATION OF SINGLE CANDIDATES IN REGIONAL HEAD ELECTION ON VOTER PARTICIPATION IN TASIKMALAYA DISTRICT," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), hlm. 1–23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i1.5363>.
- Filda, S., Pageno, I. dan Rusdin, R.B. (2024) "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI ERA SIBER," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), hlm. 104–120.
- Kamindang, I., Ambotuo, M.T.H. dan Hamid, N. (2023) "EFEKTIVITAS DEBAT POLITIK TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU TAHUN 2020 (Studi Di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), hlm. 36–49.
- Khaerah, N., Junaedi dan Muslimin, M. (2019) "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), hlm. 016. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.497>.
- Kumendong, W.L., Kaawoan, J. dan Rengkung, F. (2019) "PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Jurusan*

- Ilmu Pemerintahan*, 3(3), hlm. 1–12.
- Lahtifah, S., Alamsyah, M.N. dan Rusdin, R.B. (2025) “PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI DESA KALUKUBULA,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), hlm. 335–347.
- Lamohamad, F.M., Pageno, I. dan Sisrilnardi (2024) “Pengaruh Citra Dan Isu Kebijakan Politik Kandidat Capres- Cawapres Tahun 2024 Terhadap Perilaku Memilih Generasi Z Di Kabupaten Parigi Moutong,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1–3, hlm. 27–40.
- Nadir, N. dan Wardani, W.Y. (2019) “MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK DALAM FATSUN DEMOKRASI PANCASILA DAN DELIBERATIVE,” *The Journal of Society & Media*, 3(1), hlm. 126. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p126-141>.
- Nadya, Hasbullah dan Sasterio (2023) “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Palu Di Kecamatan Tawaeli Pada Masa Pandemic Covid 19,” *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), hlm. 48–56.
- Pasinringi, A. dan Bahri, S. (2019) “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PLATFORM PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (Studi Efektifitas Komunikasi Politik Pada Aspek Kognitif, Afektif Dan Konatif Di Kecamatan Mambooro Barat),” *KINESIK*, 6(3), hlm. 263–277.
- Prastyanti, S. (2018) “KOMUNIKASI, PARTISIPASI, DAN KONFLIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,” *Journal Acta Diurna*, 14(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2018.14.1.1143>.
- Rahman, R.A., Satriawan, I. dan Diaz, M.R. (2022) “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, 19(1), hlm. 047. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31078/jk1913>.
- Ronaldi (2023) *Perilaku Memilih Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Soppeng 2020*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Saepudin, E., Damayani, N.A. dan Budiono, A. (2018) “PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG,” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(1), hlm. 86. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9895>.